



Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Kedudukan M&E dalam Siklus Manajemen Pembangunan
- Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rumah Swadaya
 - Mengadopsi Ten Steps to a Results Based Monitoring and Evaluation System –Ray C Rist



Kedudukan M&E dalam Siklus Manajemen Pembangunan

UU25/2004
ttg SPPN





Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman



Sasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Akses Air Minum Layak (%)	70,0	70,3	77,0	84,0	100
Akses Sanitasi Layak (%)	69,4	72,2	77,4	83,2	100
	Akses Layak: 61,1	Akses Layak: 62,4	Akses Layak: 66,3	Akses Layak: 70,6	Akses Layak: 85
	Akses Dasar: 8,3	Akses Dasar: 9,8	Akses Dasar: 11,1	Akses Dasar: 12,4	Akses Dasar: 15
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 100%) Perencanaan: 0 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 85%) Perencanaan: 116 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 70%) Perencanaan: 96 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 45%) Perencanaan: 121 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 0%) Perencanaan: -
Kekurangan Tempat Tinggal Berdasarkan Perspektif Menghuni (Juta Rumah Tangga)	7,6	7,0	6,5	6,0	5,0

Sumber: Bappenas, dalam Rapat Panja RKP 2017

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan

2. Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh

3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat

4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

ARAH KEBIJAKAN YANG Mendukung REVOLUSI MENTAL

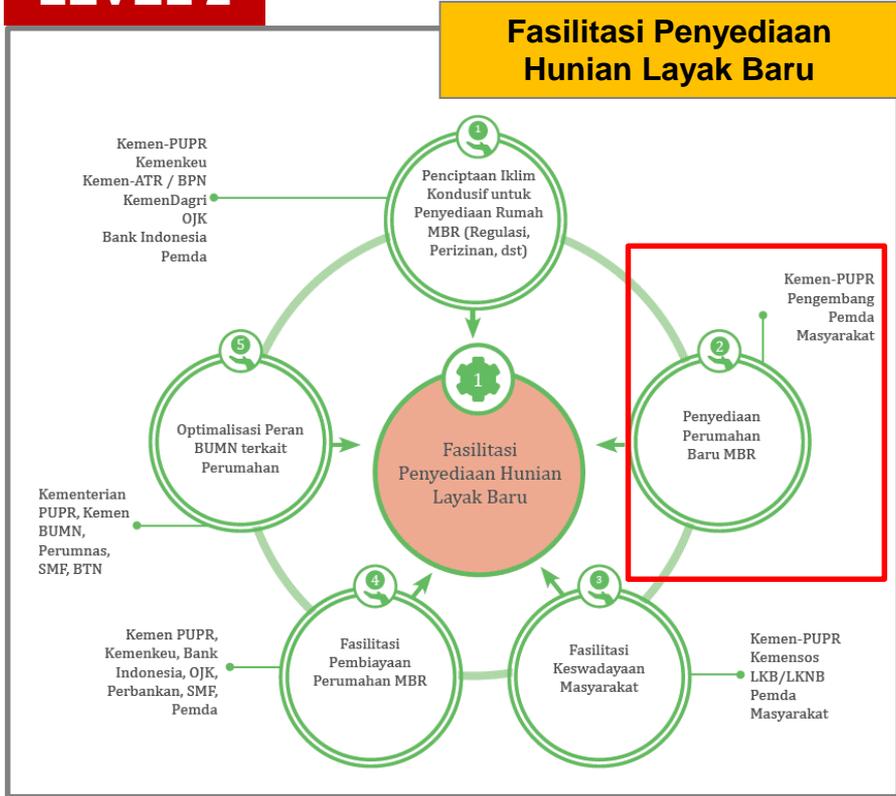
1. Perilaku hemat air
2. Stop buang sampah di sungai dan saluran
3. Stop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung)
4. Tertib pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
5. Gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
6. Gerakan menabung untuk perumahan

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

LEVEL 1



LEVEL 2



Sumber: Bappenas, dalam Rapat Panja RKP 2017

Prioritas Nasional

Perumahan dan Permukiman

2/4

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru		
1.1	Penciptaan Iklim Kondusif untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Masukan Teknis dan 1 NSPK pola pembiayaan perumahan • 1 Rancangan Peraturan Menteri untuk rumah tapak, rusun, rumah swadaya, pembiayaan mikro, investasi perumahan
1.2	Penyediaan Perumahan Baru MBR	<ul style="list-style-type: none"> • 11.400 unit sarusun dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) • Bantuan stimulan rumah baru swadaya untuk 2.000 rumah • 1.900 rumah khusus dengan PSUnya
1.3	Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat	7.863 kelurahan mendapat pendampingan pemberdayaan masyarakat
1.4	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	<ul style="list-style-type: none"> • 175.000 RT memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak dan 50.000 RT memperoleh KPR Sarusun • 124.250 RT memperoleh subsidi bantuan uang muka
1.5	Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • 8.000 unit rusunawa memperoleh <i>public service obligation (PSO)</i> tarif sewa • Tersedianya 750 ha tanah tersedia dan 60.000 unit rumah terbangun
2. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk kawasan kumuh)		
2.1	Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman	Penyelesaian Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kota di 121 kab/kota
2.2a	Penguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuh	Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas) pengembangan kawasan permukiman untuk 507 kab/kota
2.2b	Pembangunan permukiman (termasuk yang berbasis komunitas)	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 107.500 rumah • Penataan 667 Ha kawasan permukiman khusus • Penataan 7.501 Ha kawasan permukiman perdesaan • Penataan 9.500 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan

Sumber: Bappenas, dalam Rapat Panja RKP 2017

Prioritas Nasional

Perumahan dan Permukiman

3/4

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.3	Konsolidasi lahan (<i>land consolidation</i>) untuk penanganan permukiman kumuh	13.848 bidang tanah terkonsolidasi
2.4	Penyediaan air minum dan sanitasi layak dan terintegrasi	Sasaran kegiatan prioritas ini terintegrasi dengan Program Prioritas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
3. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi		
3.1	Peningkatan <i>demand</i> Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • 35.000 desa sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat • 5.000 desa mengikuti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
3.2	Penyediaan Infastruktur Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat skala regional di 2 kab/kota, skala kab/kota di 6 kab/kota, skala kawasan di 33 kab/kota, dan skala komunal di 108 kab/kota • Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pendampingan Layanan Lumpur Tinja Terpadu (LLTT) di 53 kab/kota • Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala regional di 3 kab/kota dan skala kab/kota di 49 kab/kota • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala komunal di 95 kab/kota • 281.800 Sambungan Rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan
3.3	Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • 507 kab/kota menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) • 144 kab/kota memutakhirkan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) • 26 kab/kota menyusun SSK

Sumber: Bappenas, dalam Rapat Panja RKP 2017

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

4/4

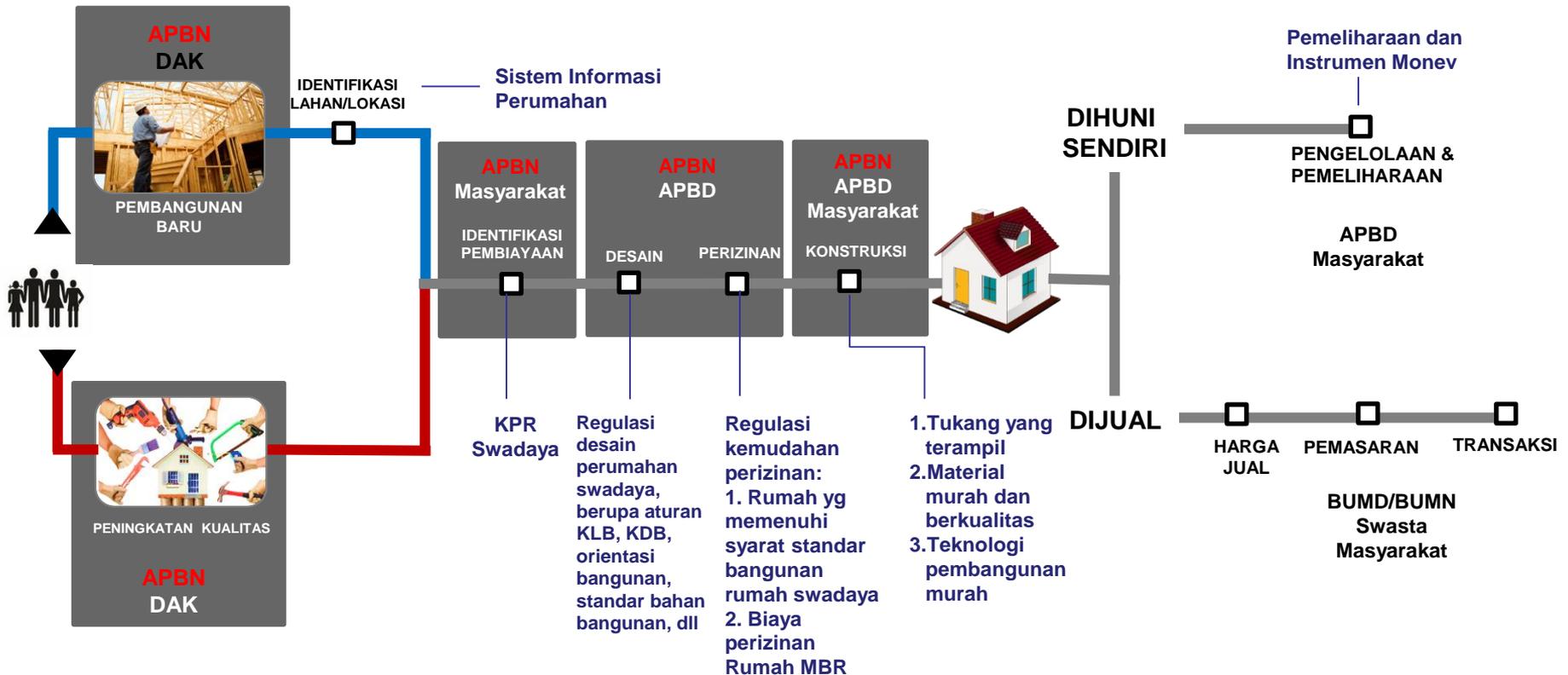
No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4. Peningkatan Ketersediaan Air Baku		
4.1	Jaga Air	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya sarana dan prasarana air baku dengan debit 7,1 m³/s• Rehabilitasi sarpras air baku dengan debit 0,2 m³/s• Tertanganinya genangan pada 403 Ha• Terbangunnya 6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai pada 6 DAS Prioritas
4.2	Simpan Air	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan 49 sumber mata air• Pembangunan 42 embung• Konservasi 15 danau• Rehabilitasi 21 embung• Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah seluas 1.000 Ha
4.3	Hemat Air	<ul style="list-style-type: none">• Strategi penerapan pemanenan air hujan skala rumah tangga dan industri• Terlaksananya sistem bauran air domestik• Penurunan kebocoran jaringan perpipaan

Sumber: Bappenas, dalam Rapat Panja RKP 2017

Kolaborasi Pendanaan

“71% masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadaya”

BUSINESS PROCESS RUMAH SWADAYA



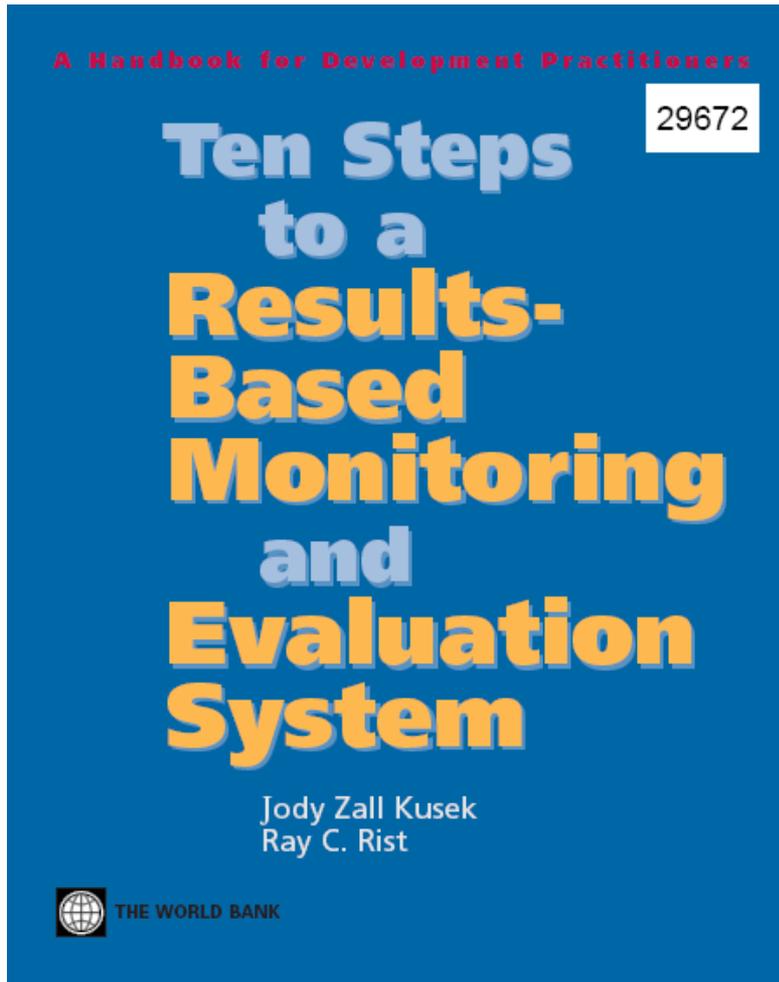
Sumber: Bappenas, Multilateral Meeting II RKP 2017



Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rumah Swadaya

Ten Steps to a Results- Based Monitoring and Evaluation System

<http://preval.org/documentos/00804.pdf>



1. Conducting a Readiness Assessment
2. Agreeing on Outcomes to Monitor and Evaluate
3. Selecting Key Performance Indicators to Monitor Outcomes
4. Setting Baselines and Gathering Data on Indicators
5. Planning for Improvement—Selecting Results Targets
6. Monitoring for Results
7. The "E" in M&E—Using Evaluation Information to Support a Results-Based Management System
8. Reporting the Findings
9. Using the Findings
10. Sustaining the M&E System within the Organization

Pedoman Monitoring dan Evaluasi





Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- Mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan perumahan swadaya;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis dan administratif serta upaya pemecahannya; dan
- Memastikan konsistensi antara konsep pengembangan Perumahan Swadaya dengan komitmen pemerintah daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pengembangan perumahan swadaya di semua jenjang pelaksanaan;
- Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran antara pusat dan daerah; dan
- Tepat dan terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Ruang Lingkup

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMN, Renstra PUPR, RPJMD, dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan
- Dampak dari pengembangan perumahan swadaya.





Pengertian

- **Rumah swadaya** adalah
- **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:
 - Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output),
 - Pelaporan tentang kemajuan,
 - Identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.
- **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.



Input

1. **Kebijakan.** Berupa kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan Rumah Swadaya.
2. **Aturan Peruntukan Lahan.** Adanya Peraturan Daerah yang menetapkan alokasi pengembangan Rumah Swadaya yang tertuang dalam RTRW, RDTR dan/atau Rencana Zonasi.
3. **Kegiatan dan Anggaran.** Identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan Rumah Swadaya.
4. **Sumber Daya Manusia (SDM).** Jumlah dan kompetensi SDM di Rumah Swadaya.
5. **Kelembagaan.** Identifikasi bentuk kelembagaan yang ada dan mendukung pengembangan Rumah Swadaya [contoh: Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Usaha Bersama (KUB)].
6. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.** Paket teknologi yang diterapkan di Rumah Swadaya.
7. **Sarana.** Identifikasi sarana yang ada di Rumah Swadaya.
8. **Prasarana.** Identifikasi prasarana yang ada di Rumah Swadaya.
9. **Persyaratan Administrasi.** Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi [Rencana Induk, Surat Keputusan Penetapan Lokasi]
10. **Kerja Sama Lintas Sektor.** Identifikasi jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang berasal dari *stakeholders* selain Kementerian PUPR
11. **Kerja Sama Lintas Wilayah.** Identifikasi aliran penduduk dan pemasaran dari dan keluar kawasan.



Proses

1. **Kesesuaian Prosedur.** Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Ketaatan Hukum.** Kegiatan yang dilakukan mengikuti aturan hukum yang berlaku.
3. **Kelembagaan.** Frekuensi pertemuan dan partisipasi anggota lembaga pengelola Rumah Swadaya.
4. **Tepat Waktu.** Pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
5. **Sesuai rencana.** Berpedoman pada Renstra Rumah Swadaya yang telah ditetapkan.
6. **Promosi.** Jumlah dan jangkauan promosi yang dilakukan sesuai dengan jenis.
7. **Sosialisasi.** Frekuensi dan partisipasi dalam sosialisasi Rumah Swadaya.
8. **Sertifikasi.** Efisiensi dalam proses keluarnya sertifikat.
9. **Fasilitasi Kerja Sama Antar Wilayah.** Jumlah fasilitasi yang dilakukan untuk mendorong kerja sama antar wilayah.

Output

1. **Penambahan Sarana.** Jumlah dan jenis sarana Rumah Swadaya yang berkembang dan bertambah.
2. **Penambahan Prasarana.** Jumlah dan jenis prasarana utama (jalan, air, listrik, dan lain-lain) yang berkembang dan bertambah.
3. **Peningkatan Usaha.** Jumlah dan jenis usaha (Rumah Swadaya dan ikutannya) yang berkembang.
4. **Peningkatan Kontribusi dari Semua Stakeholders.** Kegiatan dan anggaran dari stakeholders (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat).
5. **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM.** Jumlah dan kualitas SDM yang memiliki keterampilan di bidang Rumah Swadaya.
6. **Peningkatan Jumlah Kelompok yang Terampil.** Jumlah kelompok yang memiliki keterampilan di bidang Rumah Swadaya meningkat.

4 Outcome

- 1. Peningkatan Pembangunan dan Pemasaran.** Jumlah, nilai, dan kualitas Rumah Swadaya.
- 2. Peningkatan Pendapatan.** Peningkatan penghasilan rata-rata yang diterima oleh pelaku utama.
- 3. Peningkatan Permodalan dan Investasi.** Meningkatnya jumlah modal dan investasi di bidang Rumah Swadaya maupun usaha ikutannya di Rumah Swadaya.
- 4. Penyerapan Tenaga Kerja.** Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan Rumah Swadaya dan kegiatan ikutannya.



Kelembagaan

1. Untuk melaksanakan pengembangan Perumahan Swadaya diperlukan pelaksana Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan yang kuat di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga mampu melihat dan melakukan penilaian baik terhadap kegiatan sektoral di daerah maupun kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh daerah.
2. Pada tingkat Kabupaten/Kota:
 1. Melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan swadaya
 3. Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan perumahan swadaya; dan
 4. Membuat laporan berkala.
3. Pada tingkat provinsi, Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Eselon I lingkup Kementerian PUPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perumahan Swadaya melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya di seluruh Indonesia.



Sistem dan Prosedur

1. **Penetapan indikator untuk dimonitor.** Menetapkan indikator-indikator untuk memantau kemajuan dari sisi masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcomes). Indikator ini harus jelas, relevan, dapat diukur dan dibatasi waktu sehingga dapat memberikan masukan yang berkesinambungan dan informasi yang lengkap mengenai kinerja.
2. **Mengumpulkan informasi tentang situasi saat ini.** Pengumpulan informasi dapat digunakan pada awal periode monitoring, evaluasi dan pelaporan kemudian dibandingkan terhadap perubahan atau tingkat capaian yang akan ditetapkan.
3. **Menetapkan target untuk dicapai dan jadwal untuk mencapainya.** Target dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini, potensi yang ada, anggaran yang tersedia, teknologi yang dikuasai dan SDM yang ada.
4. **Monitoring dan Evaluasi data secara teratur untuk menguji target.** Monitoring dan Evaluasi data yang dihasilkan menjadi alat bukti mengenai kinerja dan dapat menjadi petunjuk bila ada perubahan yang harus diadakan untuk mencapai target yang dicapai.
5. **Pelaporan hasil.** Pelaporan hasil merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan yang baik akan dapat dilihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya.



Mekanisme Monitoring

- Pelaksanaan Monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan Rumah Swadaya dilakukan terhadap seluruh satuan kerja yang melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengembangan Rumah Swadaya di pusat dan daerah baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
- Secara lebih rinci objek monitoring meliputi:
 - Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari APBN untuk instansi pusat;
 - Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan untuk satuan kerja daerah;
 - Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari DAK;
 - Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari PHLN;
 - Monitoring pelaksanaan program/kegiatan dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung (*on-going project*) dan pada saat kegiatan sudah operasional.

Monitoring pada saat kegiatan berlangsung (*on-going project*)

1. **Monitoring tidak langsung** yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I lingkup PUPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Rumah Swadaya dengan mempelajari laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah
2. **Monitoring langsung** yang dilakukan melalui peninjauan ke lapangan (*on the spot*).
 - Pada tingkat Kementerian, kegiatan monitoring langsung ini akan dilakukan oleh Eselon I lingkup PUPR yang bertanggung jawab pelaksanaan Rumah Swadaya atau secara terintegrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Rumah Swadaya melalui Biro Perencanaan.



Substansi Monitoring

- Substansi/materi Monitoring diarahkan pada hal-hal pokok pelaksanaan program/kegiatan, meliputi:
 1. Realisasi penggunaan anggaran;
 2. Realisasi fisik (output) dan tingkat pemanfaatan sarana fisik yang sudah dibangun serta manfaat (outcome) yang dicapai dari suatu output/kegiatan (indikator dan parameternya);
 3. Masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Rekomendasi/tindak lanjut yang harus disampaikan.



Evaluasi Rumah Swadaya

- Materi Evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran.
- Evaluasi dilakukan di masing-masing Pokja Kabupaten/Kota dan Eselon I penanggung jawab Rumah Swadaya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
 - Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal (ex-ante),
 - Sedang pelaksanaan (on-going), dan
 - Evaluasi akhir (ex-post)



Ex-Ante Evaluation

1. Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal suatu lokasi dimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan atau dengan kata lain Evaluasi ini dilakukan sebelum kegiatan diimplementasikan.
2. Hasil Evaluasi ini berupa data dasar yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan baik bagi hasil Evaluasi on-going, maupun hasil Evaluasi ex-post.



7 On-going Evaluation

- 1. Evaluasi Kegiatan Sedang Berjalan.** Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan sedang diimplementasikan/berjalan.
 - Evaluasi ini dapat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada saat Evaluasi Pertama (On-going Evaluation) yang dilakukan pada akhir semester I dan Evaluasi Kedua (Terminal Evaluation) yang dilakukan menjelang kegiatan berakhir.
 - 2. Evaluasi Operasional Kegiatan.** Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan sudah selesai dan sudah dalam keadaan operasional.
 - Evaluasi operasional kegiatan dilakukan berdasarkan hasil monitoring operasional kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.
- Contoh: melihat capaian penyerapan anggaran dan fisik kegiatan serta mengidentifikasi hambatan untuk mengakselerasi pencapaian target



Ex-post Evaluation

- Evaluasi ini dapat dilaksanakan setelah program/kegiatan berakhir beberapa tahun guna melihat dampaknya terhadap kelompok sasaran yang ditetapkan.
- Contoh: Evaluasi gap analisis antara target vs capaian.
- Target rumah swadaya:
 1. 71% masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadaya
 2. Tahun 2017 bantuan stimulan rumah baru swadaya untuk 2.000 rumah
- Bandingkan angka tersebut dengan capaian/realisasinya

Terima Kasih

